

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN
TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN
ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA
PEMERINTAH KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Asri Manullang

140810283

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN
TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN
ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA
PEMERINTAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Asri Manullang

140810283

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Asri Manullang
NPM/NIP : 140810283
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa“ **Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam,4 Agustus 2018

Asri Manullang
140810283

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN
TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN
ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA
PEMERINTAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Asri Manullang

140810283

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 7 September 2018

Syahril Effendi, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN BERKONSEP *VALUE FOR MONEY*

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi dengan adanya pertanggungjawaban serta keterbukaan yang jujur dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang didasarkan pada *value for money* yang merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah sehingga hasil anggaran kerjanya ekonomis, efisiensi, dan efektivitas maka permasalahan anggaran yang boros pada pemerintahan dapat diminimalisir. Jenis penelitian ini asosiatif kausal, pengambilan data dengan kuesioner, dan teknik pengambilan sampel *Sampling Jenuh* serta penelitian ini menggunakan jenis data primer dan diolah menggunakan alat bantu program statistik dengan pengujian analisis data uji validitas instrumen, uji kualitas data seperti validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas dan pengujian hipotesis yaitu analisis regresi berganda, uji t, uji r² dan uji f. Hasil penelitian maka kesimpulannya bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* dan variabel transparansi secara parsial berpengaruh. Dan secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah kota Batam harus dipertahankan, dan transparansi terutama informasi hasil pengelolaan anggaran pemerintah perlu ditingkatkan publikasi laporan hasil anggarannya melalui media massa dan lembar resmi pemerintah daerah secara jujur dan terbuka. Pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* harus dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengantarkan pemerintahan menjadi pemerintahan yang lebih baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money*

ABSTRACT

EFFECT OF PUBLIC ACCOUNTABILITY AND PUBLIC TRANSPARENCY ON BUDGET MANAGEMENT CONCEPTS VALUE FOR MONEY

Accountability and transparency is the principles determines that every activity and final outcome of budget management must be accountable to the community as the highest sovereignty with accountability and honest disclosure in the implementation of budget management based on value for money which is the core of performance measurement in government organizations so that the results the budget performance is economical, efficiency, and effectiveness then the wasteful budget problems in government can be minimized. This type of research is associative causal, data collection with questionnaire, and sampling technique of Saturated Sampling and this research uses primary data types and processed using statistical program aids with testing data analysis, classical assumption test and hypothesis testing. The result of the research hence the conclusion that partially accountability influence to budget management concept concept value for money and variable of transparency partially have an effect. And simultaneously the variables of accountability and transparency together affect the budget management concept of value for money. Based on the results of the research, suggestions given that the accountability of the Batam city government financial statements must be maintained, and transparency, especially information on the results of the government budget management, needs to be enhanced the publication of the report of its budget results through mass media and official sheet of the local government in an honest and open manner. The budget management concept of value for money must be well implemented and implemented, in order to improve the welfare of society and lead the government into a better government.

Keywords: Accountability, Transparency, Budget Management Concept Value For Money

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam, Ibu Dr.Nur Elfi Husada, S.Kom.,M.Si
2. Bapak Suhardianto, S.Hum.,M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
3. Ketua Program Studi Bapak Haposan Banjarnahor S.E., M.Si
4. Bapak Syahril Effendi S.E., M.Ak selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Wan Darussalam selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Batam
7. Bapak/Ibu pegawai BAPPELITDA yang telah membantu dan mendukung, sekaligus menjadi responden dalam penelitian.
8. Orang tua saya Alm.B.Manullang dan R.Situmorang yang telah mendukung saya dalam perkuliahan.
9. Saudara-saudara kandung saya Lelly Sartika Manullang, Tetty Erida Manullang, Ryanti Manullang, Adiwanto Manullang, Bernarnius Manullang dan Yuvita Mariana Manullang.
10. Teman-teman kampus Respika Panjaitan maupun di luar kampus Cristin Natalia Hutabarat dan yang saya sayangi Rikardo serta orang-orang yang membantu saya, memotivasi dan membagi pengalamannya dalam penyelesaian tugas akhir.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat dan kasih karunia-Nya, Amin.

Batam, 4 Agustus 2018

Asri Manullang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.6.2 Manfaat Praktis	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Teori.....	8
2.1.1 Pengelolaan Anggaran.....	8
2.1.2 Konsep <i>Value For Money</i>	10
2.1.3 Konsep <i>Good Governance</i>	16
2.1.4 Akunabilitas Publik.....	18
2.1.5 Transparansi Publik.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran dan Pembangunan Hipotesis	30
2.4 Paradigma Penelitian.....	33

2.5 Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tahapan Penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi	35
3.2.2 Sampel	35
3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	36
3.3.1 Variabel Independen	36
3.3.2 Variabel Dependen	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Skala dan Pengukuran Data	38
3.5.1 Instrumen Penelitian	38
3.5.2 Metode Analisis Data	39
3.5.2.1 Uji Validitas Data	39
3.5.3 Uji Kualitas Data	40
3.5.3.1 Uji Validitas	40
3.5.3.2 Uji Realibilitas	40
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	41
3.5.4.1 Uji Normalitas	41
3.5.4.2 Uji Multikolinieritas	42
3.5.4.3 Uji Heterokedastisitas	42
3.5.5 Uji Hipotesis	43
3.5.5.1 Analisis Regresi Berganda	43
3.5.5.2 Uji T	43
3.5.5.3 Uji Koefisien Determinansi (R ²)	44
3.5.5.4 Uji F	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Profil Responden	46
4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden	46
4.1.1.2 Usia Responden	46
4.1.1.3 Pendidikan Responden	47
4.1.2 Analisis Deskriptif	48
4.1.2.1 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Publik	48
4.1.2.2 Deskripsi Variabel Transparansi Publik	49
4.1.2.3 Deskripsi Variabel Pengelolaan Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	50
4.1.3 Uji Kualitas Data	52
4.1.3.1 Uji Validitas	52
4.1.3.2 Uji Reliabilitas	53
4.1.4 Uji Asumsi Dasar	54
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	56

4.1.5.1 Uji Multikolinieritas	56
4.1.5.2 Uji Heterokedastisitas	58
4.1.5.3 Analisis Statistik Berganda.....	60
4.1.6 Hasil Uji Hipotesis	61
4.1.6.1 Hasil Uji T	62
4.1.6.2 Hasil Uji F	63
4.1.6.3 Hasil Analisis Koefisien Determinansi (R ²)	65
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	65
4.2.2 Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	66
4.3.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i>	66
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	 68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
 DAFTAR PUSTAKA.....	 70
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengukuran Kinerja <i>Value for Money</i>	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Histogram <i>Regression Standarized Residual</i>	54
Gambar 4.2 Normal <i>P-P Plot</i>	55
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	36
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Indikator Operasional	37
Tabel 4.1 Rincian penyebaran Kuesioner	45
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	46
Tabel 4.3 Usia Responden	47
Tabel 4.4 Pendidikan Responden	48
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Publik	49
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Publik	50
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	37
Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedisitas Model <i>Gletser Jet</i>	59
Tabel 4.13 Koefisien Regresi	60
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji T	62
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji R^2	65

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Persamaan Regresi Berganda	43
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bergulirnya era reformasi di Indonesia saat ini telah memberikan peluang perubahan paradigma pembangunan secara lebih merata, adil, dan berimbang. Perubahan dimulai dari agenda reformasi salah satunya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya yang dijelaskan dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dilanjutkan dengan pengesahan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Desak Nyoman,Edy dan Made,2015).

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan konsep *good governance* (Iswahyudi, Triyuwono, Achsin,2016), selain itu menimbulkan konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan pemerintahan daerah karena erat kaitannya dengan kelangsungan kinerja sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran untuk kelangsungan masyarakat banyak.

Sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya masukan paling kecil untuk mencapai keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Muindro renyowijoyo,2010:7).

Dalam pengelolaan pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran berkonsep *value for money*, mengindikasikan munculnya asimetri informasi yang muncul dalam teori keagenan, antara masyarakat dan SKPD yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi ke dalamnya (Firdiansyah dan sudana,2015).

SKPD-SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan, dan juga selalu merugi. Tuntutan baru agar *SKPD-SKPD* ini meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros).

Kasus yang menunjukkan fakta tersebut yaitu terdapat beberapa temuan BPK terhadap sejumlah SKPD yang ada di kota Batam. pada tahun 2017 BPK melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT), satu di antaranya di Pemko Batam. Dari pemeriksaan itu, BPK menemukan terjadi

kelebihan pembayaran atas penggunaan tenaga ahli. Itu untuk kegiatan jasa konsultasi pada tiga SKPD dan atas 16 paket pengerjaan. Beberapa diantaranya ditemui di RSUD dan Dinas Pendidikan. Temuan lainnya yaitu dari tujuh kabupaten/ kota di Kepri ditambah satu provinsi, ada satu laporan keuangan yang diragukan pertanggungjawabannya. Hal itu dikatakan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, Sabtu (13/5) di Batam. Dari laporan yang didapat pihak BPK, ada penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah yang sulit dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Selain itu pada Desember 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Dinas Pendidikan, menemukan ada pemahalan harga pada dua paket pengadaan aplikasi akuntansi pelaporan dana BOS.

Adanya kasus-kasus seperti di atas menunjukkan jika SKPD di kota Batam belum menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian dan masih belum dipahaminya prinsip transparansi dan akuntabilitas. SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang tujuan pembentukannya salah satunya adalah melayani kepentingan masyarakat atau publik. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya SKPD melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep *performance budgeting system* (anggaran kinerja) dengan cara dikembangkan sistem anggaran APBD yang berbasis kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Rosalina (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik khususnya dalam hal penganggaran.

Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau (Adri, Surya, & Azhar,). Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja (Adiwirya, 2015). Dalam penelitiannya Wandari, Sujana dan Putra, (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. Rezky Mulya Anugriani (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi publik terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah kota Batam.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tepat sasaran.
2. SKPD sebagai sarana untuk melakukan tindak kecurangan dan inefisiensi.
3. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pada SKPD belum berjalan dengan baik.
4. Transparansi pengelolaan anggaran pada SKPD belum berjalan dengan baik.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value for Money* pada pemerintah kota Batam tahun 2017.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran yang berkonsep *value for money*?
2. Bagaimana pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran yang berkonsep *value for money*?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran yang berkonsep *value for money*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan pengaplikasiannya; dan
2. sebagai referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi Pihak pemerintah Kota Batam

Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam hal ini mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

2. Bagi pihak lain

Diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengelolaan Anggaran

Dalam penelitiannya Debi (2015) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan semua anggota di sebuah organisasi. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Terdapat banyak pengertian tentang anggaran, menurut *the National Committee on Governmental Accounting* menyimpulkan bahwa anggaran meliputi rencana pengeluaran / belanja dan rencana penerimaan / pembiayaan belanja mencakup jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial (Deby, 2015). Lain halnya menurut Irna (2015) anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa yang akan datang. Anggaran perbelanjaan Daerah (APBD) menurut pasal 1 UU No.32 tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Desak Nyoman dkk (2015) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Anggaran yang baik akan menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan. Hal ini didukung oleh Irna (2017) yang menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa yang akan datang.

Pengelolaan anggaran (APBD) yang baik merupakan penerapan prinsip *Value for Money (VfM)* dan mutlak dilakukan pembuat anggaran dalam hal ini adalah eksekutif. Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik khususnya dalam hal penganggaran sektor publik (Rosalina,2012). *Good governance* akan terwujud jika anggaran dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Penerapan *good governance* tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas. Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan anggaran yang juga menjadi faktor penting yaitu ketepatan waktu. Sebuah anggaran dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi

secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). Perlu adanya pengawasan internal yang baik dalam pengelolaan sebuah anggaran untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja anggaran agar kinerja dapat berjalan dengan baik.

2.1.2 Konsep *Value For Money*

Sistem pengelolaan anggaran berkonsep *Value for Money (VfM)* didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya masukan yang paling kecil untuk mencapai keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Muindro Renyowijoyo, 2010). Pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah: pertama, ekonomi merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah dengan arti lain bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya) dan terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan yang digunakan, dengan menghindari pengeluarannya. *Good governance* akan terwujud jika anggaran dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Penerapan *good governance* tidak terlepas dari adanya

Pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* atau pengawasan atas kinerja output. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien. Prinsip akuntabilitas secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah, selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan anggaran yang juga menjadi faktor penting yaitu ketepatan waktu. Sebuah anggaran dituntut juga dalam halnya ketepatan waktu dimana diharapkan adanya komunikasi informasi secara lebih awal, untuk menghindari adanya keterlambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan dalam menyusun anggaran. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). Perlu adanya pengawasan internal yang baik dalam pengelolaan sebuah anggaran untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja anggaran agar kinerja dapat berjalan dengan baik.

Kedua, efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input).

Pengukuran *value for money* dapat dilakukan dengan empat langkah yaitu:

a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi yaitu biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan, biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan biaya organisasi lain yang sejenis, dan penggunaan sumber daya finansial secara optimal.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep *Value for Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Jadi dapat disimpulkan apabila semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

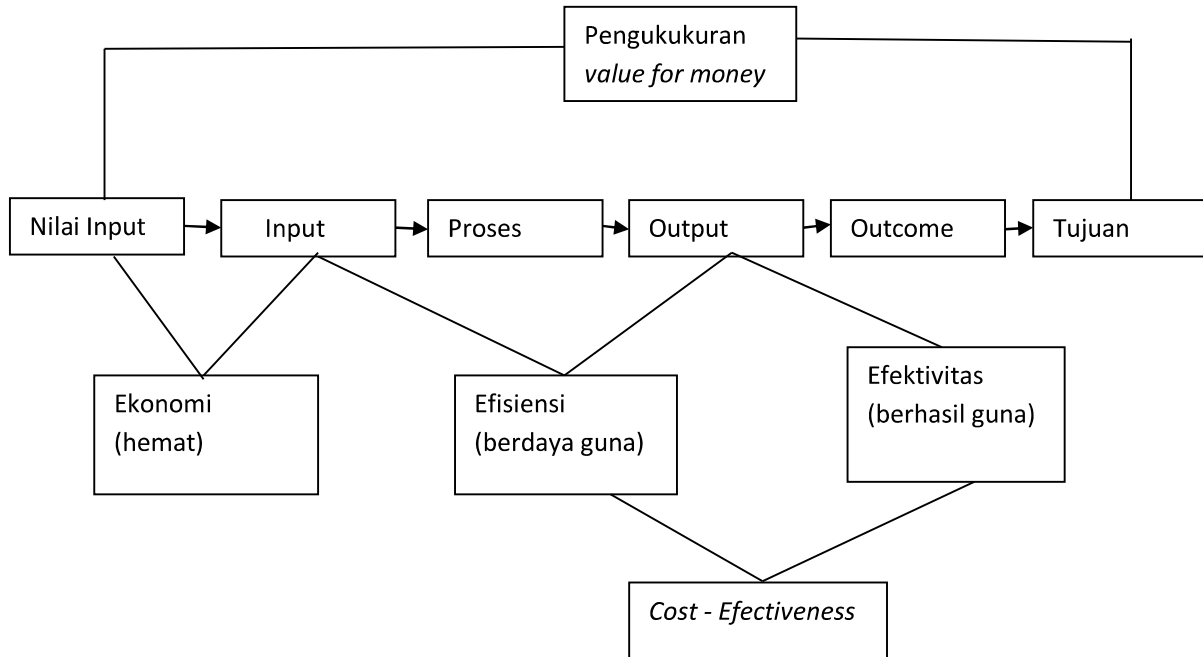
c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya diperbolehkan melebihi yang telah dianggarkan, bisa dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah atau belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* nilainya akan lebih tinggi daripada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



Gambar 2.1

Pengukuran Kinerja *Value for Money*

(Sumber : Muindro Renyowijoyo, 2010)

a. Masukan (input)

Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

b. Keluaran (*output*)

Keluaran merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Harus diingat pula keluaran yang diinginkan, dan keluaran lainnya yang tidak diinginkan yang merupakan efek samping.

c. Sasaran Utama (*throughput*)

Analisis *Value For Money* memerlukan data masukan dan keluaran yang memadai. Masalahnya adalah tidak tersedianya data keluaran yang lengkap, sehingga sulit mengukur data keluaran. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digunakan keluaran antara (*inetrmediate output*) atau indikator kinerja (*performance indicator*).

d. Pencapaian hasil (*Outcome*)

Hasil adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, biasanya dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang menyebabkan *outcome* sulit ditetapkan atau diukur yaitu:

1. Tidak dapat dijelaskan dengan sederhana yang memudahkan monitoring.
2. Adanya masalah politik dalam proses penetapan *outcome*, tergantung penguasa.
3. Penentuan *outcome* perlu pertimbangan kualitas, output meningkat, lebih ekonomis dan efisien, atau sudah berkualitas.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik (Harryanto dkk, 2007:9), antara lain:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik

2.1.3 Konsep *Good Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai sebagai cara mengelola urusan publik dan sering juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Muindro Renyowijoyo, 2010). *World Bank dan United Nation Development Program (UNDP)* mendefenisikan *governance* dalam arti yang berbeda. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Good governance ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan

pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. *Good governance* muncul akibat semakin kompleksnya permasalahan, seolah menegaskan bahwa tidak adanya iklim pemerintah yang baik dan didorong dalam reformasi sektor publik. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN).

Dasar hukum *good governance* pada institusi pemerintah Indonesia yang pertama adalah TAP MPR. No VII/MPR/2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih. Tujuan penerapan *good governance* dalam pemerintahan adalah agar operasi dari instansi pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan pencapaian sasaran dari perusahaan dapat tercapai (Sari dan Raharja, 2012). Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP antara lain:

1. *Participation* (partisipasi)
2. *Rule of Law* (Hukum dan Aturan)
3. *Transparancy*
4. *Rensponsiveness*
5. *Consensus orientation*
6. *Equity*
7. *Efficiency and Effectiveness*
8. *Accountability*

Menurut penelitian yang dilkakukan oleh Dedi (2009) yang menemukan bahwa penerapan *good governance* yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Faktor yang dapat mempengaruhi *good governance* dan merupakan pilar umum dari *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selain itu terdapat *value for money* yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik.

Adapun beberapa manfaat penerapan *Good Governance* adalah :

1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik.
2. Akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat.
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.4 Akuntabilitas Publik

Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan makin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Menurut Muindro Renyowijoyo (2015:14) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sama halnya dengan Irna (2017) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah.

Sedangkan Debi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab. Hal senada diungkapkan oleh Chi-chi (2012) "*accountability is all about being answerable to those who have invested their trust, faith, and resources to you*" dan merupakan kewajiban untuk menunjukkan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang disepakati dan petugas melaporkan secara adil dan akurat mengenai hasil kinerja

Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah (Wandari, 2015). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) yang merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

Anggaran yang baik akan menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat satu set keluaran yang diinginkan. *Good governance* akan jika anggaran dapat dikelola dengan sebaik mungkin. Penerapan *good governance* tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas (Wandari et al., 2015) dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Menurut Debi (2015) akuntabilitas sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri dari empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik (Muindro Renyowijoyo 2010:15) yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan pertaturan yang ditetapkan.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik atau belum dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah menurut penelitian Faridah (2015), dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.5 Transparansi Publik

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi publik merupakan indikator yang sangat dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik , Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Debi (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang

dicapai. Dalam penelitiannya Verena Kroth (2012) yang berjudul *Subnational Budget Transparency An Analysis of Ten Pilot Studies* menyatakan *Transparency at the subnational level is required in order to expose service delivery issues, which are a major concern in many countries. Moreover, subnational budget documents deal with items and expenditures that are particularly visible and tangible for citizens. In this sense, subnational transparency has the potential to provide answers to basic questions such as what happened to central government funds at the local level and whether plans to build a new neighborhood school, or carry out local road works were actually implemented. Although these are important questions, hardly any literature or empirical studies have specifically addressed transparency at the subnational level.* Hal ini ditegaskan oleh Suryono (2015), transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*. Melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik (Aries,dkk 2016). Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan akan praktek pelayanan publik yang transparan dalam *good governance* di tingkat pemerintahan daerah saat ini menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Mengingat bahwa sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan institusi kelembagaan pemerintah yang trnsparan dan efektif untuk melayani kebutuhan publik. Menurut Irna (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu : (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap aspek informasi. Keduanya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Transparansi tata pemerintahan memiliki indikator-indikator yang berfungsi sebagai parameter dari pelaksanaan transparansi. Indikator-indikator bagi transparansi tata pemerintahan tersebut meliputi:

- a) Tersedianya mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi yang mensyaratkan bahwa seluruh proses tata pemerintahan mulai dari pengorganisasian, alokasi anggaran sampai pada implementasi kegiatan harus terbuka secara penuh dan dapat dinilai dengan baik oleh masyarakat maupun stakeholders.

- b) Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik. Indikator ini berkaitan dengan bahwa sebuah peraturan dan prosedur pelayanan publik harus cukup jelas dimengerti oleh pengguna jasa pelayanan publik. Aparat pelayanan publik harus memiliki kemampuan dan tersedianya mekanisme dan prosedur yang memungkinkan agar pengguna jasa pelayanan publik dapat memahami dengan jelas mulai dari persyaratan, prosedur, dan waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan.
- c) Tersedianya mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindak aparat publik di dalam kegiatan melayani aspirasi publik. Indikator ini mensyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka aparat pelayanan publik dituntut untuk memudahkan proses pelaporan dan penyebaran informasi kepada publik dan pengguna pelayanan publik dalam setiap aspek penyelenggaraannya.

Menurut Debi (2015) Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang menjadi referensi penelitian yaitu:

1. Debi Putri Pertiwi (2015), tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah (studi empiris SKPD provinsi Riau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.
2. I Desak Nyoman Nyoman Tri Wandu, Edy Sujana dan Made Pradana Adi Putra (2015) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for*

money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng.

3. Muhammad Firdiansyah Adiwirya dan I Putu Sudana (2015) tentang akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara simultan pada anggaran kinerja SKPD Kota Denpasar. Transparansi berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar. Anggaran berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar
4. Aries Iswahyudi, Iwan Triuwono dan M.Achsin (2016) tentang hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *value for money* dan good governance (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. pemahaman transparansi berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman *value for money* berpengaruh positif terhadap *good governance* pada SKPD di Kabupaten Lumajang.

5. Rezky Mulya Anugriani (2014), tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.
6. Irna Setyaningrum (2016) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Transparansi berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Pengawasan berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja dengan Konsep *Value for Money* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Debi Putri Pertiwi (2015)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap penegelolaan anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada instansi pemerintah (studi empiris SKPD provinsi Riau)	Akuntabilitas,transparansi, pengawasan, dan pengelo laan anggaran	Akuntabilitas,berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep <i>value for money</i> . Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep <i>value for money</i> . Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep <i>value for money</i>	Meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi terhadap pengelo laan anggaran	Melakuka n penelitian tentang anggaran pada satu SKPD Pemerintahn saja bukan secara keselu ruhan
2	I Desak Nyo man Made	Pengaruh pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng	Akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu,pen gawasa, dan kinerja anggaran	akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. Ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran <i>berkonsep value for money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng	Meneliti pengaruh akuntabilit as dan transp ransi terhadap penegeloal aan anggaran	Melakuka n peneliti an tentang pengelo laan anggaran bukan kinerja
3	Muham mad Firdians yah Adiwirya dan I Putu Sudana (2015)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar.	Akuntabilitas,transpa ransi, dan anggaran berbasis kinerja	akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara simultan pada anggaran kinerja SKPD Kota Denpasar. Transparansi berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar. Anggaran berpengaruh secara simultan	Meneliti Akuntabi litas, transpa ransi terhadap pengelo laan anggaran	Melakuka n peneliti an tentang pengelolaa nanggaran bukan kinerja

				pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar		
4	Aries Iswahyudi, Iwan Triyuwono, dan M.Achsin (2016)	hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, <i>value for money</i> dan <i>good governance</i> (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)	Akuntabilitas, transparansi, partisipasi, <i>value for money</i> dan <i>good governance</i>	pemahaman transparansi berpengaruh positif terhadap <i>good governance</i> pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap <i>good governance</i> pada SKPD di Kabupaten Lumajang. pemahaman akuntabilitas berpengaruh positif terhadap <i>good governance</i> pada SKPD di Kabupaten Lumajang. Pemahaman <i>value for money</i> berpengaruh positif terhadap <i>good governance</i> pada SKPD di Kabupaten Lumajang.	Meneliti tentang akuntabilitas, dan transparansi dan <i>value for money</i>	Melakukan penelitian pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran bukan pemahaman
5	Rezky Mulya Anugraini (2014)	pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone	Akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan kinerja anggaran	akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> , transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> , pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>Value for Money</i> .	Meneliti akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan anggaran	Melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran bukan kinerja

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pembangunan Hipotesis

1. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran *berkonsep value for money* pada Pemerintah Kota Batam

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro

Renyowijoyo, 2015:14). Penelitian dari Debi Putri Pertiwi (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Hal ini didukung oleh penelitian Desak Nyoman,dkk (2015) bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, maka semakin bagus pula pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

2. Pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kota Batam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Adanya transparansi mengakibatkan masyarakat menjadi semakin kritis dalam menanggapi setiap kejadian-kejadian yang ada, sehingga bisa digunakan sebagai alat pengendalian terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian I Desak Nyoman Tri Wandari (2015) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, serta menurut

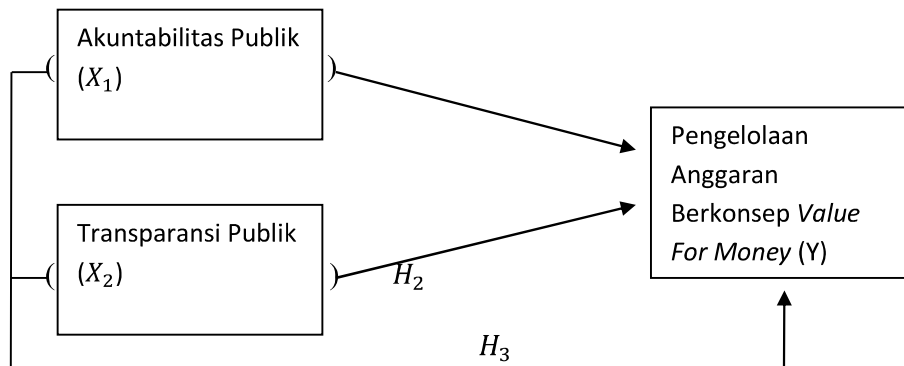
penelitian Muhammad Firdiansyah Adiwirya (2015), secara stimultan dan parsial transparansi berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi informasi maka semakin bagus pula kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*.

3. Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Pemerintah Kota Batam

Penerapan akuntabilitas dan tansparansi akan membuat kinerja anggaran menjadi semakin bagus, sehingga praktik inefisiensi, penyelewengan dan pemborosan anggaran dapat dihapuskan atau diminimalisir, karena kinerja organisasi dapat dinilai dan diawasi oleh publik. Hasil penelitian dari I Desak Nyoman Tri Wandu (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas dan transparansi, akan membuat kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* menjadi baik.

2.4 Paradigma penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2 kerangka pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada dasar tujuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintah Kota Batam.

H_2 : Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintah Kota Batam

H_3 : Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada Instansi Pemerintah Kota Batam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintah Kota Batam, dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2013:37), “Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih”. Pada penelitian ini menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan tiga variabel yaitu Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Batam tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey dengan cara membagikan kuesioner kepada responden.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan (BAPPELITDA) di Instansi Pemerintah Kota Batam.

3.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BAPPELITDA. Untuk menentukan jumlah responden dari sampel dalam penelitian ini, teknik sampling jenis *Non Probability Sampling*, jenis penelitian ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono (2001:60) non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. yang digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh (sensus), karena jumlah populasi dalam penelitian ini hanya ada 40 jadi semua populasi dijadikan sampel.

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 orang dengan struktur sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kasubbag	3
5	Kasubbid	8
6	Staf	23
Jumlah		40

3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.3.1 variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

1. variabel (x_1) adalah akuntabilitas publik
2. variabel (x_2) adalah transparansi publik

Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah Kota Batam.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan anggaran berkonsep *Value for Money* yang merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

Tabel 3.2

Variabel Penelitian dan Indikator Operasioal

Variabel	Indikator	Alat Ukur	Skala
Variabel Independen (X)			
1. Akuntabilitas Publik	a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	Kuesioner	Likert
	b. Akuntabilitas Proses	Kuesioner	Likert
	c. Akuntabilitas Program	Kuesioner	Likert
	d. Akuntabilitas Kebijakan	Kuesioner	Likert
2. Transparansi Publik	a. Komunikasi publik oleh pemerintah	Kuesioner	Likert
	b. Hak masyarakat	Kuesioner	Likert
Variabel Dependen (Y)			
3. Penegelolaan Anggaran berkonsep <i>Value for Money</i>	a. Ekonomis	Kuesioner	Likert
	b. Efisien	Kuesioner	Likert
	c. Efektif	Kuesioner	Likert
	d. Keadilan	Kuesioner	Likert
	e. Kesetaraan	Kuesioner	Likert

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono,2011:137). Data diperoleh dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti kepada responden, yaitu pegawai yang bekerja pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Pemerintah kota Batam .

3.5 Skala dan Pengukuran Data

3.5.1 Instrumen Penelitian

Pengukuran untuk masing-masing menggunakan instrumen kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala Likert 5 point. Sugiyono (2011:93) mengatakan bahwa “*skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner di mana jawaban diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = diberi skor 2
3. Netral (N) = diberi skor 3
4. Setuju (S) = diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) = diberi skor 5

Instrumen dalam penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk *checklist*.

3.5.2 Metode Analisis Data

3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas butir-butir instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS)* versi 22 *for Windows*. Penentuan validitas butir instrument ditentukan pada skor/nilai yang terdapat pada skor statistik "*Corrected item-total Correlation*", yang menunjukkan angka korelasi antara skor item dengan skor total item. Menginterpretasikan hasilnya adalah dengan cara skor item yang ada (r-hitung) dikonsultasikan atau dibandingkan dengan r-tabelnya. Uji validitas berfungsi untuk menelaah kemampuan setiap item pertanyaan dalam mengukur variabelnya yaitu dengan mengamati nilai koefisien validitas dari setiap item pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Taraf

kepercayaan yang digunakan dalam uji validitas dalam penelitian ini adalah 95%. Jika koefisien korelasi positif dan $> 0,3$ maka indikator bersangkutan dianggap valid, Ghozali (2011).

3.5.3 Uji Kualitas Data

3.5.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Kriteria digunakan valid atau tidak valid apabila koefisien korelasi r kurang dari nilai nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 5% berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2011).

3.5.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. pengujian *cronbach alpha* digunakan untuk menguji tingkat keadilan (*reability*) dari masing-masing angket variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2011).

Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrument umumnya adalah perbandingan antar r -hitung dengan r -tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Nilai r -hitung diwakili oleh

nilai alpha, apabila alpha hitung lebih besar daripada r-tabel dan alpha hitung bernilai positif, maka suatu instrumen penelitian tersebut reliabel.

Tingkat reliabilitas dengan metode *cronbach alpha* diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai dengan 1. Apabila skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat dilihat dengan diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai *alpha cronbach* 0,00-0,20 berarti tidak reliabel
2. Nilai *alpha cronbach* 0,20-0,39 berarti kurang reliabel
3. Nilai *alpha cronbach* 0,40-0,59 berarti cukup reliabel
4. Nilai *alpha cronbach* 0,60-0,79 berarti reliabel
5. Nilai *alpha cronbach* 0,80-1,00 berarti reliabel.

(Ghozali, 2011)

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas data adalah untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Uji yang digunakan adalah Uji Histogram, *Kolmogorov Smirnov* dan Normal PP Plot. Dalam uji *Kolmogorov Smirnov* nilainya signifikansinya di atas 0,005 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Uji Histogram, hasilnya berbentuk

lonceng, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian dalam analisis grafik, jika data menyebar di sekitar garis diagonal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* 10 (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan *Uji Glejser*. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $>0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji lainnya melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*). Jika *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka model regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2012:275).

Persamaan regresi berganda adalah:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Anggaran dengan Berkonsep *Value for Money*

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan).

b₁, b₂ = Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.

3.5.5.2 Uji T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Kriteria pengujian

untuk uji t adalah: a. H_0 diterima jika $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$. b. H_0 ditolak jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$.

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien korelasi parsial (adjusted R^2).

3.5.5.4 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.